



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710
Website: pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-2702/DJ.I/HM.01/09/2026 Jakarta, 8 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Dukungan dan Komitmen terhadap Hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tingkat Daerah dalam Rangka Percepatan Capaian Imunisasi Tahun 2026

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tingkat Daerah dalam rangka Percepatan Capaian Imunisasi Tahun 2026 secara daring pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026. Rapat tersebut membahas berbagai tantangan dan strategi percepatan peningkatan capaian imunisasi, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan akses dan pemanfaatan layanan imunisasi, penguatan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, integrasi data dan program, dukungan pembiayaan, serta penguatan intervensi pada wilayah dengan kesenjangan cakupan imunisasi yang masih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan surat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor IM.01.01/C.IV/2384/2026 tertanggal 4 September 2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tingkat Daerah dalam Rangka Percepatan Capaian Imunisasi Tahun 2026 (terlampir). Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan dukungan dan komitmen sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menindaklanjuti hasil rapat tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris



M. Arskal Salim GP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah
3. Direktur Pesantren

Nomor : IM.01.01/C.IV/2384/2026 4 September 2026
Lampiran : dua lembar
Hal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tingkat Daerah
dalam Rangka Percepatan Capaian Imunisasi Tahun 2026

Yth. (Daftar terlampir)

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tingkat Daerah dalam rangka Percepatan Capaian Imunisasi Tahun 2026 secara daring pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026. Pertemuan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/ kota yaitu Sekda, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Kanwil Kemenag, TP PKK/Pembina Posyandu serta Lintas sektor di tingkat pusat (sesuai undangan). Rapat tersebut membahas berbagai tantangan dan strategi percepatan peningkatan capaian imunisasi, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan akses dan pemanfaatan layanan imunisasi, penguatan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, integrasi data dan program, dukungan pembiayaan, serta penguatan intervensi pada wilayah dengan kesenjangan cakupan imunisasi yang masih tinggi.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, diperlukan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan **hasil pertemuan yang sudah disepakati untuk dapat ditindaklanjuti bersama sebagai berikut:**

Instansi	Dukungan yang diharapkan
A. Pimpinan Daerah	
Gubernur/ Bupati/ Wali Kota	- Berkomitmen nyata dengan menetapkan percepatan imunisasi sebagai salah satu prioritas daerah. - Menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh lintas sektor terkait untuk mendukung dan melaksanakan rencana tindak lanjut aksi percepatan peningkatan capaian imunisasi.

B. Koordinasi dan Perencanaan Daerah	
Sekretariat Daerah	• Mengkoordinasikan OPD, lintas sektor dan mitra terkait dalam pelaksanaan tindak lanjut, termasuk dengan membentuk kelompok kerja imunisasi. • Memimpin pelaksanaan review capaian secara berkala dan memastikan hasil review ditindaklanjuti.
Bappeda Provinsi/ Kabupaten/ Kota	• Memastikan percepatan capaian imunisasi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. • Mengawal dukungan dan keterlibatan lintas OPD terkait dalam pelaksanaan percepatan capaian imunisasi.
C. Pelaksanaan Program Kesehatan	
Dinas Kesehatan Provinsi	• Menetapkan wilayah prioritas berdasarkan jumlah zero-dose, drop-out, cakupan imunisasi, akses pelayanan dan kasus/KLB PD3I • Memantau pelaksanaan tindak lanjut di kabupaten/kota prioritas dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan.
Dinas Kesehatan Kab/Kota	• Memvalidasi sasaran dan menetapkan desa/kelurahan serta puskesmas prioritas. • Menyusun microplanning imunisasi. • Memastikan ketersediaan dan pendistribusian vaksin serta logistik lainnya tepat waktu sesuai kebutuhan • Melakukan monitoring zero-dose, drop-out dan capaian imunisasi lengkap serta memastikan dilakukan pelacakan sasaran oleh puskesmas.
Puskesmas	• Mengidentifikasi sasaran melalui Posyandu, kunjungan rumah, sekolah, madrasah dan sumber data lainnya. • Melakukan pelacakan anak zero-dose/ drop-out. • Melaksanakan pelayanan imunisasi rutin, penjangkauan dan imunisasi kejar sesuai microplanning.
D. Pemerintahan Kewilayahan	
Kecamatan	• Memimpin koordinasi lintas sektor tingkat kecamatan untuk mendukung percepatan capaian imunisasi. • Memantau desa/kelurahan dengan capaian imunisasi

	rendah dan memastikan tindak lanjutnya. Menyampaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan di tingkat kecamatan ke kabupaten/kota.
Desa/ Kelurahan	- Menetapkan desa/kelurahan prioritas yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelayanan imunisasi. - Membantu proses pendataan, validasi sasaran dan mobilisasi keluarga sasaran imunisasi, terutama bagi keluarga yang anaknya belum lengkap imunisasinya. - Memberikan dukungan operasional sesuai kewenangan dan ketentuan untuk kegiatan imunisasi dan mobilisasi. - Menyampaikan informasi pengumuman mengenai jadwal layanan dan pentingnya imunisasi saat pertemuan rutin di desa/kelurahan, serta media komunikasi lainnya yang tersedia.
E. Penggerakan Masyarakat dan Posyandu	
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota	- Menggerakkan kader dan keluarga untuk mendukung percepatan capaian imunisasi. - Mendorong keluarga untuk memastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal.
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan/Desa/Kelurahan	- Memberikan edukasi pentingnya imunisasi dan bahaya jika tidak diimunisasi, serta mengingatkan (<i>reminder</i>) keluarga mengenai jadwal imunisasi anak. - Mengajak keluarga untuk memobilisasi atau membawa anaknya mendapatkan imunisasi di posyandu/puskesmas.
TP Posyandu Provinsi/Kab/Kota	- Menggerakkan jejaring Posyandu untuk menemukan sasaran imunisasi. - Mendorong koordinasi antara posyandu dan puskesmas dalam menindaklanjuti sasaran imunisasi.
TP Posyandu Kecamatan	- Mengkoordinasikan identifikasi bayi, baduta dan anak yang belum/terlambat imunisasi - Memastikan informasi sasaran disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh posyandu/puskesmas.

TP Posyandu Desa/Kelurahan	• Membantu memeriksa atau mengidentifikasi status imunisasi • Mengingatkan (<i>reminder</i>) dan memobilisasi keluarga sasaran untuk membawa anak mendapatkan imunisasi.
Kader Posyandu	• Melakukan kunjungan rumah atau pelacakan sasaran yang tidak hadir, berkoordinasi dengan puskesmas dan melaporkan hambatan yang ditemukan. • Melakukan kegiatan Cek Status Imunisasi di Buku KIA bersama, serta diharapkan dapat meminta orang tua untuk mengirimkan foto buku KIA melalui WAG untuk membantu identifikasi anak yang belum lengkap imunisasinya.
F. Dukungan Lintas OPD	
Dinas Pendidikan Kab/Kota (pendidikan PAUD, SD, SMP, dan sederajat)	• Mengkoordinasikan satuan pendidikan untuk membantu mengidentifikasi anak yang belum lengkap imunisasinya • Mendukung pelaksanaan imunisasi di satuan pendidikan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Satuan Pendidikan	• Mengidentifikasi siswa yang belum lengkap imunisasinya. • Menyampaikan informasi kepada orang tua dan memfasilitasi pelaksanaan imunisasi sesuai jadwal.
Dinas Sosial Kab/Kota	• Memfasilitasi koordinasi penjangkauan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki anak belum lengkap imunisasi • Mengidentifikasi keluarga rentan yang memiliki hambatan akses imunisasi dan menghubungkan dengan layanan yang sesuai
Pelaksana/Pendamping PKH	• Mengingatkan (<i>reminder</i>) kepada KPM mengenai pentingnya imunisasi dan jadwal layanan imunisasi. • Menghubungkan keluarga dengan Posyandu/Puskesmas apabila anak belum lengkap mendapatkan imunisasi.
Kantor Wilayah Kemenag (Kanwil Kemenag)	• Memetakan dan menggerakkan madrasah/pesantren untuk membantu menjangkau anak yang belum lengkap imunisasinya. • Mendorong madrasah/pesantren untuk mendukung

	pelaksanaan imunisasi sesuai jadwal dan ketentuan.
Kantor Kementerian Agama (Kankemenag)	• Menyampaikan pesan mengenai manfaat, keamanan dan pentingnya imunisasi dan bahaya jika tidak diimunisasi dalam kegiatan pembinaan masyarakat. • Mendorong tokoh agama dan satuan pendidikan keagamaan untuk mendukung imunisasi.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Memantau dan mendorong agar imunisasi menjadi bagian dari prioritas kegiatan pemerintahan desa. • Memastikan dukungan penggunaan dana desa untuk kegiatan yang mendukung imunisasi sesuai dengan Permendes Nomor 16 Tahun 2025.
G. Komunikasi dan Informasi	
Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Provinsi	• Menyusun dan menyebarluaskan informasi mengenai manfaat, keamanan dan pentingnya imunisasi dan bahaya jika tidak diimunisasi melalui kanal komunikasi pemerintah daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Kab/Kota	• Menyebarluaskan informasi mengenai jadwal, lokasi layanan, manfaat dan keamanan imunisasi melalui kanal komunikasi pemerintah daerah • Mendukung klarifikasi cepat terhadap misinformasi/hoaks imunisasi dan edukasi melalui kanal media sosial
H. Dukungan Masyarakat dan Mitra	
Organisasi Kemasyarakatan	• Mendukung edukasi, mobilisasi/mengajak masyarakat, dan membantu penjangkauan keluarga/komunitas yang sulit mendapatkan layanan imunisasi.
Organisasi Keagamaan	• Mendukung penyampaian informasi dan komunikasi tentang manfaat dan keamanan imunisasi serta membantu mengatasi keraguan masyarakat terhadap imunisasi.
Organisasi Profesi	• Mendukung edukasi dan penyampaian informasi berbasis bukti, serta komunikasi risiko kepada masyarakat.

Media Lokal	• Membantu menyebarkan informasi mengenai manfaat, keamanan, bahaya PD3I, jadwal dan lokasi layanan imunisasi. • Membantu memberikan informasi yang benar dan mengklarifikasi misinformasi terkait imunisasi.
--------------------	--

Demikian hasil pertemuan dan rencana tindak lanjut kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan mohon bantuan untuk dapat dikoordinasikan dengan jajaran masing-masing di semua tingkatan. Dukungan Bapak/ Ibu sangat kami harapkan dalam percepatan peningkatan capaian imunisasi untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia Emas 2045.

Atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Imunisasi,



dr. Indri Yogyaswari, M.A.R.S

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pedesaan dan PDT
4. Dirjen Penanggulangan Penyakit
5. Gubernur Seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
7. Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia;
8. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>.
Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Lampiran Surat 1

Nomor : IM.01.01/C.IV/2384/2026

Tanggal : 4 September 2026

DAFTAR PEJABAT YANG DITUJU

Yang Terhormat.

1. Sekretaris Daerah di 38 Provinsi;
2. Sekretaris Daerah di 514 Kabupaten Kota;
3. Kepala Bappeda di 38 Provinsi;
4. Kepala Bappeda di 514 Kabupaten Kota;
5. Kepala Dinas Kesehatan di 38 Provinsi;
6. Kepala Dinas Kesehatan di 514 Kabupaten Kota;
7. Kepala Dinas Pendidikan di 514 Kabupaten Kota;
8. Kepala Dinas Sosial di 38 Provinsi;
9. Kepala Dinas Sosial di 514 Kabupaten Kota;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di 38 Provinsi;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama di 514 Kabupaten Kota;
12. Ketua Tim Penggerak PKK/Pembina Posyandu Provinsi di 38 Provinsi;
13. Ketua Tim Penggerak PKK/Pembina Posyandu Kabupaten Kota di 514 Kabupaten Kota;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di 38 Provinsi;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di 514 Kabupaten Kota;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi di 38 Provinsi;
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota di 514 Kabupaten Kota.
18. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah yang membidangi kesehatan Kementerian Dalam Negeri;
19. Asisten Deputi terkait peningkatan kualitas kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
20. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas;
21. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
22. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama;
23. Direktur Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama;
24. Direktur Pesantren, Kementerian Agama;
25. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga);
26. Direktur Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi);
27. Direktur Kemitraan dan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kementerian Komdigi;

28. Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM, Sekretariat Wakil Presiden RI;
29. Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, Kementerian Sosial;
31. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Sosial;
32. Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Kementerian Sosial;
33. Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
34. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
35. Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK, kementerian keuangan
36. Ketua Umum Tim Penggerak PKK/ Pembina Posyandu;
37. Sekretaris Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan;
38. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan;
39. Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Kementerian Kesehatan;
40. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan;
41. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
42. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi , Kementerian Kesehatan;
43. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
44. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan;
45. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan;
46. WHO Indonesia;
47. UNICEF Indonesia;
48. UNDP Indonesia;
49. CHAI

Direktur Imunisasi,



dr. Indri Yogyaswari, M.A.R.S